



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN DELEGASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENGHADIRI *TASK FORCE MEETING ON
THE ENHANCEMENT OF DRAFT GUIDELINES AND PROCEDURES OF
AIPA'S ENGAGEMENT WITH EXTERNALS AND
THE ESTABLISHMENT OF AIPA DIGITAL LAW LIBRARY***

TANGGAL 17 – 18 JANUARI 2024 DI JAKARTA – INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut keputusan Komite Eksekutif pada Sidang Umum ke-44 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada 5-11 Agustus 2023 lalu di Jakarta, Komite Organisasi menyepakati pembentukan *Task Force/Working Group* untuk membahas lebih jauh pembentukan *AIPA Digital Law Library*, dan penyempurnaan *Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*.

Sebagaimana amanat Statuta AIPA, organisasi AIPA bertujuan memastikan setiap Parlemen Anggota nya mengetahui langkah-langkah dan kemajuan yang telah ditempuh oleh masing-masing anggota dalam memenuhi visi ASEAN, yang berujung pada harmonisasi peraturan perundang-undangan di kawasan.

Harmonisasi bukan ditujukan sebagai penyeragaman hukum, melainkan lebih kepada sebuah mekanisme dalam menyepakati prinsip-prinsip penting, berusaha mengkoordinasikan berbagai sistem atau peraturan hukum yang berbeda dengan mengeliminir sejumlah perbedaan besar dan menciptakan persyaratan atau standar minimum.

Gagasan harmonisasi hukum ini telah lama disuarakan oleh Parlemen Anggota AIPA. Terakhir pada Sidang ke-12 ASEAN-AIPA *Leaders' Interface* di Labuan Bajo 10 Mei 2023, para pemimpin ASEAN dan Presiden AIPA sama-sama menekankan peran penting AIPA dalam mendorong harmonisasi hukum di ASEAN.

Dalam rangka mengawal harmonisasi peraturan hukum di ASEAN, AIPA telah membentuk AIPA Caucus pada 2007 sebagai sebuah mekanisme internal untuk memonitor status implementasi Resolusi AIPA yang telah diadopsi. Namun langkah yang lebih konkrit dibutuhkan, sehingga berdasarkan inisiasi dari Parlemen Kamboja pada Sidang Umum ke-43 AIPA tahun 2022 diadopsi *Resolution on the Establishment of the Digital Law Library*. Resolusi menyepakati pembentukan *AIPA Digital Law Library* sebagai sebuah langkah sistematis dalam menyimpan dokumen dan berbagi informasi dan pengetahuan terkait peraturan dan regulasi ASEAN serta negara anggotanya dengan tujuan menjadikan informasi hukum mudah diakses oleh publik.

Pertemuan *Task Force* ini dengan demikian bermaksud membahas lebih lanjut pengembangan sistem *digital law library* dimaksud, termasuk sasarannya, target pengguna, *pilot issues*, *project activities and timeline*, dan aspek keberlangsungannya.

Di samping itu, dalam *Task Force* dibahas pula penyempurnaan *Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* yang memuat tentang transformasi bentuk hubungan antara AIPA dengan mitra eksternal. Hal ini merupakan tindak lanjut dari disepakatinya Resolusi tentang penetapan biaya kontribusi bagi Parlemen Observer AIPA (Res 44/GA/2023/Org/03 *on the Implementation of Mandatory Annual Contribution to the Observer Members of AIPA*) pada Komisi Organisasi Sidang Umum ke-44 AIPA. Sesuai keputusan Komisi Organisasi, *Task Force* perlu membahas lebih lanjut mengenai implikasi dan pengaturan hak dan kewajiban mitra eksternal AIPA yang termuat dalam *Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* sehubungan dengan ditetapkannya iuran kontribusi wajib tersebut.

B. Dasar Partisipasi Delegasi

Kehadiran Delegasi DPR RI ke *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* di Jakarta berdasarkan Surat Undangan dari Sekretaris Jenderal AIPA No. 173/AIPA/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang *Nomination for Task Force Meeting/Working Group on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*.

C. Delegasi

Delegasi DPR RI yang hadir pada *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* adalah Wakil Ketua BKSAP, DPR RI, Putu

Supadma, MBA dari Fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan Anggota Komisi VI yang membidangi isu perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, Investasi dan Standarisasi Nasional.

D. Maksud Dan Tujuan Partisipasi Delegasi

1. Maksud

Kehadiran Delegasi DPR RI ke *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* dimaksudkan untuk:

1. Berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan organisasi AIPA ke depan, utamanya terkait harmonisasi regulasi dan peraturan perundangan di kawasan di ASEAN dan mekanism hubungan AIPA dengan mitra eksternal;
2. menyampaikan gagasan dan kontribusi pemikiran Indonesia untuk kemajuan organisasi AIPA;
3. Memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia agar dapat terakomodir dalam pembentukan *AIPA Digital Law Library* dan *Draft Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari kehadiran Delegasi DPR RI ke *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* ini adalah untuk mempertahankan usulan-usulan Indonesia terhadap *Draft Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* dan *AIPA Digital Law Library* yang sedang dibahas dalam *Task Force Meeting* ini agar kepentingan nasional Indonesia dapat diterima oleh negara peserta lainnya.

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Telah dilakukan persiapan teknis dan substansi sebelum menghadiri *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*. Persiapan teknis antara lain registrasi delegasi dan penyampaian input/masukan terhadap *Terms of Reference of AIPA Digital Law Library* dan *Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*. Sebagai persiapan substansi telah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait bahan materi dan persiapan butir wicara (*points of intervention*) oleh Sekretariat bersama Tenaga Ahli.

II. ISI LAPORAN

A. Situasi Umum Pertemuan

Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals ini diselenggarakan di Gedung Sekretariat AIPA, ASEAN Heritage Building, Jakarta- Indonesia dan dijadwalkan selama 2 (dua) hari yaitu:

- Rabu, 17 Januari 2024 :
- *Opening by Secretary General of AIPA*
 - *Remarks by Chair*
 - *Group Photo*
 - *First Session*
 - *Introduction of Delegations*
 - *Discussion and Adoption of the Tentative Program of Activities and Tentative Agenda*
 - *Presentation of AIPA Annual Report 2023*
 - *Scene Setting on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals by AIPA Secretariat*
 - *Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA*
 - *Engagement with Externals by AIPA Secretariat (Parliamentary Engagement)*
 - *Discussion and deliberation on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals (Parliamentary Engagement)*
 - *Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals by AIPA Secretariat (Non-parliamentary Engagement)*
 - *Discussion and deliberation on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals (Non-parliamentary Engagement)*
 - *Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA*
 - *Engagement with Externals by AIPA Secretariat (Financial Aspect)*
 - *Discussion and deliberation on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals (Financial Aspect)*

Kamis, 18 Januari
2024

: - *Second Session*

- *Presentation on the draft of the Terms of Reference of the AIPA Digital Law Library by the National Assembly of Cambodia*
- *Presentation on the Development of the AIPA Digital Law Library by AIPASecretariat*
- *Discussion*

- *Third Session*

- *Deliberation and approval on the Final Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals*
- *Subcommittee to compose a new AIPA Anthem*

Closing Session

Sidang ini dihadiri oleh perwakilan dari 9 (sembilan) Parlemen Anggota AIPA yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.

Task Force Meeting ini membahas mengenai pembentukan *AIPA Digital Law Library* dan *penyempurnaan Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*.

Presentation of Scene Setting: Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals by Secretary General of AIPA

Dalam sesi presentasi ini, Sekretaris Jenderal AIPA menjelaskan latar belakang disusunnya *the Guidelines on AIPA's Engagement with Externals*. Latar belakang yang paling rasional adalah fenomena peningkatan keterlibatan parlemen observer dengan AIPA, mengingat jumlah parlemen observer meningkat dua kali lipat selama 4 (empat) tahun terakhir, yang menandakan meningkatnya kepentingan terhadap aktivitas AIPA.

Presentasi ini juga menyoroti keinginan dari sejumlah parlemen observer, seperti Parlemen Uni Eropa dan Majelis Nasional Korea untuk meningkatkan hubungan dengan AIPA melalui berbagai inisiatif. Dalam presentasi juga dibahas mengenai diskusi dan adopsi resolusi tentang penerapan kontribusi tahunan wajib dari parlemen observer, yang bertujuan untuk memastikan kerja sama yang saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, Sekretaris Jenderal AIPA menekankan pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan eksternal dan rencana yang ditentukan untuk meningkatkan panduan yang mengatur keterlibatan AIPA dengan para pemangku kepentingan, dengan komitmen pada transparansi dan konsultasi dengan parlemen anggota AIPA.

Berbagai amandemen terhadap Statuta AIPA yang dihasilkan dari diskusi selama pertemuan *task force* ini akan dikomunikasikan kepada parlemen Anggota AIPA, dan hasil diskusi akan dilaporkan dan diadopsi pada Sidang Umum ke-45 AIPA mendatang di Laos hingga akhirnya dapat diimplementasikan.

Presentation of “Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals: Parliamentary Engagement” by Secretary General of AIPA

Mengawali presentasi *draft guidelines*, Sekretaris Jenderal AIPA menjelaskan mengenai bagian keterlibatan parlemen yang terbagi menjadi parlemen observer dan organisasi antar parlemen. Berkenaan dengan parlemen observer, dijelaskan tentang definisi, kriteria, prosedur untuk akreditasi, kewajiban-kewajiban serta keistimewaan yang diperoleh, *exit clause*, serta prosedur reservasi, yang pada prinsipnya menekankan perlunya kepatuhan terhadap pedoman dan kontribusi.

Berkenaan dengan *exit clause*, Sekretaris Jenderal AIPA menyoroti contoh di mana Parlemen Selandia Baru menyatakan niatnya untuk mencabut Status observer dari AIPA. Untuk mengatasi skenario tersebut, Sekretariat AIPA telah menyusun rancangan pedoman dengan prosedur pembahasan oleh Satuan Tugas (*Task Force*), yang mencakup langkah-langkah seperti penyerahan surat resmi oleh Parlemen observer kepada Presiden AIPA, komunikasi internal dan konsultasi di dalam AIPA, dan, bila perlu, penyerahan rancangan resolusi mengenai status keanggotaan kepada Sidang Umum AIPA untuk diadopsi.

Sekretaris Jenderal AIPA secara singkat juga menjelaskan keterlibatan dengan Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok (*Non Aligned Movement Parliamentary Network-NAM PN*), termasuk kronologi perundingan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perhatian Parlemen Anggota AIPA, serta meminta panduan mengenai prosedurnya. Selain itu, Sekretaris Jenderal AIPA juga membahas keterlibatan dengan organisasi antar-parlemen lainnya, menyoroti kriteria, modalitas, dan pertimbangan untuk kerja sama. Sepanjang presentasi, Sekretaris Jenderal AIPA menekankan perihal transparansi, konsultasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai AIPA.

Presentation by AIPA Secretary General: “Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals: Non-Parliamentary Engagement”

Sekretaris Jenderal AIPA mengawali presentasi dengan mengelaborasi Pasal 14 pada Statuta AIPA mengenai peran Sekretariat AIPA dan hubungannya dengan Rencana Strategis AIPA. Sekretaris Jenderal AIPA juga menyoroti data tentang mitra yang terlibat dengan AIPA sejak tahun 1993, termasuk MoU dengan mitra AIPA, *project partners*, dan mitra aktif.

Sekretaris AIPA menjelaskan *Draft Guidelines*, di mana keterlibatan entitas non-parlemen terbagi menjadi: 1) *Strategic Development Partners*, 2) *Knowledge and Community Partners*, dan 3) *Media Partners*.

Prosedur dan kriteria bagi *Strategic Development Partners* dan *Knowledge and Community Partners* dijelaskan secara lebih rinci oleh Sekretaris Jenderal AIPA, dengan tambahan keistimewaan yang dirancang untuk *Strategic Development Partners*. Berkenaan dengan *Media Partners*, Sekretaris Jenderal AIPA menjelaskan bahwa keterlibatan dengan mitra media akan membutuhkan koordinasi dengan Sekretariat Nasional AIPA mengingat masing-masing parlemen telah membangun hubungan dengan organisasi media.

Presentation by AIPA Secretary General: “Introduction on the Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals: Financial Aspects”

Dalam presentasi, Sekretaris Jenderal AIPA menyajikan informasi alokasi Kontribusi Parlemen Observer yang telah dibahas sebelumnya pada Komite Organisasi di Sidang Umum ke-44 AIPA. Sekjen AIPA menjelaskan perkembangan terkini sehubungan dengan implementasi resolusi yang telah diadopsi berkenaan dengan Kontribusi Wajib anggota observer AIPA, termasuk penerbitan *proforma invoice*, penerimaan kontribusi wajib dari Ukraina dan Morocco, dan reservasi.

Lebih jauh lagi, beliau menjelaskan bahwa aspek finansial dalam rancangan pedoman meliputi prosedur dan akuntabilitas bagi keterlibatan parlemen dan non-parlemen. Mengenai keterlibatan parlemen, Sekretaris Jenderal AIPA menekankan akuntabilitas finansial, termasuk penyusunan laporan finansial, audit eksternal, dan penyampaian resolusi ke Sidang Umum.

Untuk keterlibatan non-parlemen, dijelaskan dalam presentasi mengenai perbedaan antara dana hibah dan dukungan teknis. Ukuran untuk

transparansi dan tanggung jawab juga diuraikan dalam *Draft Guidelines*, seperti *project focal points* dan audit eksternal.

Presentation on the draft of the Terms of Reference of the AIPA Digital Law Library by the National Assembly of Cambodia

Presentasi disajikan oleh Anggota Parlemen Kamboja, **Dr. Ly Chheng** yang menyoroti tentang peran vital AIPA sebagai *platform* pengelolaan, diseminasi, dan peningkatan pengetahuan serta kesadaran tentang peraturan, dan peningkatan kapasitas di antara para anggotanya. Ia menegaskan tentang pembentukan *AIPA Digital Law Library* (AIPA DLL) yang diajukan oleh Parlemen Nasional kamboja pada Sidang Umum ke-43 AIPA di tahun 2022, yang ditujukan untuk memperdalam pengetahuan tentang beragam peraturan hukum dalam kawasan ASEAN dan sekitarnya, dan untuk meningkatkan transparansi dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendiseminasian Peraturan Hukum ASEAN secara digital.

Dr. Ly Chheng menyoroti mengenai *database* yang dirancang untuk melayani kesejahteraan publik dengan menyediakan informasi dalam bahasa nasional parlemen anggota AIPA dan bahasa inggris, melayani khalayak luas termasuk anggota parlemen, pejabat pemerintah, parlemen pengamat, praktisi hukum, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dr. Ly Chheng menginformasikan bahwa Parlemen Kamboja telah mengembangkan aplikasi AIPA DLL, yang menyajikan rincian kegiatan AIPA, profil AIPA dan parlemen anggotanya, media sosial serta situs web AIPA dan masing-masing Parlemen Anggota AIPA, serta peraturan perundang-undangan dari setiap Parlemen Anggota AIPA. Ia menguraikan, Sekretariat AIPA akan terlibat dan bertanggung jawab dalam memperbarui kegiatan, mengunggah dan memelihara informasi, dengan akses kata sandi dan ID yang disediakan oleh Parlemen Kamboja. Setelah disetujui secara resmi, Parlemen Kamboja akan memberikan akses kepada Sekretariat AIPA. Majelis Nasional Kamboja akan mendukung tim teknis dengan pelatihan dan saran.

Presentation by AIPA Secretary General: “AIPA Digital Law Library”

Sekretaris Jenderal AIPA mengawali presentasinya dengan mengingatkan kembali tentang Resolusi *the Establishment of the AIPA Digital Law Library* (AIPA DLL) yang diadopsi pada Sidang Umum ke-43 AIPA. Resolusi yang telah diadopsi tersebut juga termasuk *concept note* awal dan mandat bagi Sekretariat AIPA untuk bekerja sama dengan Parlemen Kamboja. Lebih jauh, Sekjen AIPA menjelaskan pembentukan AIPA DLL yang berfungsi sebagai platform pemantauan kebijakan kawasan yang potensial dan bertujuan untuk

menawarkan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Selain itu, Sekretaris Jenderal juga membahas proses ratifikasi Perjanjian ASEAN, menekankan pentingnya undang-undang yang tepat untuk implementasi yang efektif. Ia mengidentifikasi empat mata rantai yang hilang dalam ASEAN, termasuk data yang tersebar, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya platform terpusat, dan kurangnya sinkronisasi hukum. Berdasarkan temuan tersebut dan untuk menyelaraskan dengan tiga pilar ASEAN, Sekjen mengusulkan untuk membuat tiga lapisan dalam AIPA DLL: Perjanjian ASEAN, Resolusi AIPA, dan Hukum/Perundang-undangan Nasional.

Sekjen AIPA menginformasikan mengenai target tanggal website tersebut dapat diakses oleh masyarakat, yaitu pada akhir triwulan I tahun 2024. Beliau juga menegaskan bahwa Sekretariat AIPA akan bekerja sama dengan Sekretariat Nasional untuk menyelesaikan nota konsep tersebut, kerangka acuan, pengumpulan data, dan entri data. Selain itu, ia menggarisbawahi potensi target penggunaannya, mulai dari anggota parlemen, pemerintah, hingga masyarakat umum. Beliau mengakhiri presentasinya dengan menyoroti potensi peluncuran resmi platform tersebut, yang dijadwalkan pada Kaukus ke-15 AIPA di Brunei Darussalam.

B. Partisipasi Delegasi DPR RI

Pada Sesi Pertama dalam diskusi dan pembahasan *Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals by AIPA Secretariat - Parliamentary Engagement*, Delegasi Indonesia, Putu Supadma Rudana, MBA menyampaikan *point of intervention*. Delegasi Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP menjelaskan bahwa penetapan iuran kontribusi yang diterapkan kepada *observer* AIPA merupakan yang pertama di dunia, karena berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hingga saat ini, tidak ada organisasi internasional dan regional yang menerapkan kontribusi wajib kepada *observer*. Oleh karenanya, Indonesia menyadari bahwa akan terdapat berbagai respon persetujuan yang berbeda dari negara-negara *observer* sehubungan dengan situasi finansial masing-masing negara.

Terlepas dari berbagai perbedaan posisi tersebut, atau status yang mungkin kelak akan diberikan kepada *observer* tersebut sehubungan dengan kemampuan finansial mereka dalam kontribusi, Indonesia merekomendasikan agar hubungan yang baik dengan para *observer* tetap dapat dijaga baik. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menghindari kesalahpahaman, di mana alasan mendasar dari kebijakan

penerapan kontribusi wajib tersebut pada dasarnya adalah semata untuk AIPA yang lebih baik.

Indonesia juga merekomendasikan agar dilakukannya peninjauan terhadap mekanisme penetapan kontribusi wajib bagi *observer*, misalnya setiap satu kali dalam setahun pada saat Sidang Umum AIPA, seluruh parlemen Anggota AIPA dapat menganalisis apakah penetapan kontribusi wajib ini telah sesuai dengan ekspektasi AIPA atau justru kontraproduktif terhadap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan para *observers*, dalam jangka panjang.

Selain itu, dalam pertemuan, Indonesia juga meminta klarifikasi lebih jauh mengenai prosedur keterlibatan dengan *observers* pada *Forum of Young Parliamentarians of AIPA* dan *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) terutama tentang sejauh mana para *observer* dapat terlibat dalam proses perancangan, pembahasan dan adopsi resolusi.

Pada sesi diskusi dan pembahasan mengenai *Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals by AIPA Secretariat - Financial Aspect and Exit Clause*, Delegasi Indonesia mengusulkan untuk kepentingan AIPA agar dapat mempertimbangkan jika *observer* secara formal tidak melanjutkan status keterlibatan formalnya dengan AIPA, maka metode pengajuan kembali status *observer* dapat diatur lebih terperinci dalam *guidelines*, sebagai solusi apabila *ex-observer* tersebut ingin mengajukan kembali statusnya.

Menanggapi presentasi tentang *the Technical Framework on the AIPA Digital Law Library*, Delegasi Indonesia pada prinsipnya mendukung konsep dan perencanaan *AIPA Digital Law Library*. Indonesia meyakini bahwa gagasan dan konsep tersebut memang dibutuhkan oleh AIPA sebagai upaya dan langkah konkrit harmonisasi peraturan hukum dan perundang-undangan di kawasan untuk memenuhi visi ASEAN.

Namun demikian, penerapan konsep perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 1) pendanaan dan keberlangsungan website yang akan dibuat; 2) aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya; 3) teknik pengintegrasian dokumen dari websites yang telah ada, seperti *ASEAN Law Resources* dari *National University of Singapore*, misalnya; dan 4) meningkatkan kesadaran serta diseminasi informasi tentang pengembangan *digital library* ini sebagai sebuah proses jangka panjang dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

C. Hasil Pertemuan

Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals yang berlangsung selama 2 (dua) hari, dari tanggal 17-18 Januari 2024 ini menghasilkan: 1) *Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals*; 2) *Draft of the Terms of Reference of the AIPA Digital Law Library*; dan 3) *Draft Minutes of Meeting (MoM)* yang disirkulasi kepada seluruh Parlemen Anggota AIPA untuk disempurnakan menjadi *Report of the Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*. *Task Force Meeting* juga menyepakati pembentukan aplikasi *AIPA Digital Law Library* yang sistem operasinya masih perlu dikembangkan dan disempurnakan.

Draft Guidelines and Procedures of AIPA Engagement with Externals dan *Draft of the Terms of Reference of the AIPA Digital Law Library* hasil pembahasan *Task Force* ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Komisi Organisasi pada Sidang Umum ke-45 AIPA mendatang di Laos untuk dibahas lebih lanjut dan diadopsi oleh seluruh Parlemen Anggota AIPA.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Task Force Meeting on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* telah terlaksana pada tanggal 17-18 Januari 2024 di Jakarta – Indonesia dengan lancar, aman dan sukses.
2. Delegasi Parlemen anggota AIPA menyetujui perubahan mekanisme baru bagi negara-negara Peninjau, dengan memberlakukan mandatory contribution (kontribusi wajib) yang dibayarkan tahunan terhadap AIPA. Negara-negara yang menyanggupi nantinya akan diberikan Hak Istimewa antara lain; 1) Diberi kesempatan menyampaikan pernyataan pada saat Sidang Umum AIPA 2) Berkesempatan untuk secara khusus melakukan pendekatan strategis dengan Parlemen anggota AIPA 3) Dapat mengikuti beberapa Sidang Komisi AIPA yaitu Komisi Perempuan (WAIPA) dan Komisi Pemuda (Young Parliamentarians of AIPA), dalam rangka berdiskusi, bertukar pandangan dan praktik terbaik terkait dengan substansi yang sedang menjadi pembahasan.
3. Beberapa negara seperti Ukraina dan Maroko telah memberikan konfirmasi atas kesanggupan mereka untuk membayarkan kontribusi wajib. Beberapa negara seperti Kuba telah menyatakan

ketidaksangguppannya untuk membayar kontribusi wajib karena situasi ekonomi domestik yang tidak mendukung.

4. Timor Leste yang telah menyanggah status Peninjau sejak lama di AIPA dan baru-baru ini mendapatkan status Peninjau di ASEAN, menyatakan ketidaksangguppannya untuk membayarkan kontribusi wajib di AIPA. Namun, Timor Leste menyatakan sanggup untuk membayar kontribusi rutin, apabila nanti statusnya telah berubah menjadi anggota AIPA.
5. Delegasi Singapura mengusulkan perumusan pasal khusus yang mengatur mengenai status negara yang tidak lagi secara rutin membayar kontribusi wajib. Usulan Singapura disepakati oleh delegasi yang hadir. Inti daripada usulan tersebut adalah negara yang bersangkutan tidak akan diundang mengikuti Sidang Umum AIPA dan statusnya akan dibekukan untuk sementara sebagai Peninjau, sampai ada kejelasan selanjutnya. Namun, tentu hal ini tetap perlu dimintakan persetujuan lebih dulu di Sidang Umum AIPA oleh Parlemen anggota AIPA.

B. Saran

1. Delegasi DPR RI perlu melakukan studi lebih lanjut mengenai mekanisme baru terkait Peninjau ini. Hal ini dikarenakan AIPA adalah organisasi pertama di dunia yang memberlakukan kontribusi wajib bagi Peninjau. Jika dipandang perlu, Delegasi DPR RI dapat menyampaikan pendapat pada pertemuan Komisi Eksekutif pada saat Sidang Umum AIPA yang ke-45 di Laos nanti.
2. Delegasi DPR RI dapat mendorong diberlakukannya semacam pengecualian bagi Timor Leste terkait kontribusi wajib sebagai Peninjau AIPA. Mempertimbangkan kemampuan finansial Timor Leste yang masih bergantung pada bantuan dan mengingat bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis dan geopolitik agar keanggotaan proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan di AIPA dapat berjalan dengan baik. Indonesia juga merupakan negara yang menjadi sponsor utama bergabungnya Timor Leste ke ASEAN. Apabila Timor Leste dipaksakan untuk membayar kontribusi, maka dikhawatirkan ini akan berakibat pada proses masuknya Timor Leste secara utuh ke ASEAN.

III. PENUTUP

A. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan masukan terhadap kajian pembentukan AIPA *Digital Law Library* dan penyempurnaan *Guidelines of AIPA's*

Engagement with Externals yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika di kawasan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat AIPA yang telah memfasilitasi pertemuan perdana *Task Force on the Establishment of AIPA Digital Law Library and the Enhancement of Guidelines of AIPA's Engagement with Externals* sehingga diskusi dapat berjalan secara lancar dan produktif.

B. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran berupa :

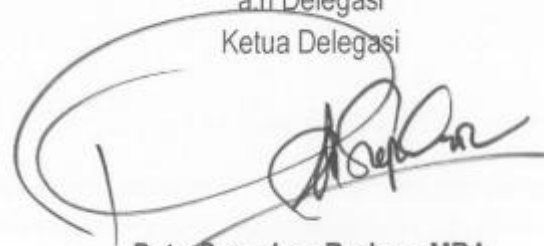
- *Term of References of AIPA Digital Law Library*
- *Adopted Term of References of AIPA Digital Law Library*
- *Initial Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*
- *Adopted Guidelines of AIPA's Engagement with Externals*
- List of Participants
- Dokumentasi

C. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi ini disusun dalam rangka prinsip keterbukaan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan. Semoga Laporan ini dapat menjadi rekomendasi untuk kegiatan sidang-sidang parlemen selanjutnya.

Jakarta, 18 Januari 2024

a.n Delegasi
Ketua Delegasi



Putu Supadma Rudana, MBA

A-563